

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)**

**KEGIATAN  
FORUM PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN**



**BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
TAHUN 2019**

---

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
KEGIATAN FORUM PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN  
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
TAHUN 2019**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kesadaran kebangsaan merupakan kondisi yang amat dinamis yang perlu dikembangkan dan didukung oleh kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan yang mantap. Jika kondisi seperti itu tetap terpelihara dan terbina dengan baik, maka akan dapat menjadikan bangsa ini menjadi kuat dan maju dan sebaliknya apabila kondisi tersebut tidak mampu dipelihara akan dapat mengakibatkan terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkenaan dengan itu, setiap elemen bangsa hendaknya memiliki cita-cita dengan tujuan yang sama tentang persatuan dan kesatuan bangsa dan setiap warga negara haruslah terpatri hasrat dan tekad untuk hidup damai dan bersatu sebagai satu bangsa yang merupakan kondisi alamiah, majemuk dan kompleks. Keragaman tersebut merupakan unsur yang sangat strategis dan menguntungkan untuk membangun bangsa, namun disisi lain juga memberi potensi kerawanan yang besar dari berbagai segi kehidupan yang sewaktu-waktu dapat memicu gejala dan konflik antar golongan, ras, agama dan daerah yang dapat memecah belah bangsa.

Dengan demikian, kita harus selalu waspada dan melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan, kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan acuan sebagai dinamika perkembangan kebijakan ke depan dalam penguatan wawasan kebangsaan.

Implementasi wawasan kebangsaan pada masa sekarang ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dimana kondisi dan situasinya tentu telah berubah pula.

Dalam kaitan itulah rekonstruksi kebangsaan harus dilakukan, dengan membangun kembali rasa, paham dan semangat kebangsaan dengan memberikan makna baru yang selaras dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa yang nantinya akan menjadi penopang dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dikembangkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu dilaksanakan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **B. DASAR HUKUM**

1. TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2397/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1507.DIII tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembekalan Wawasan Kebangsaan bagi Ormas/LSM;
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 890/0440.DI tanggal 14 Februari 2012 tentang Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan;
12. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

### **C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL**

#### **1. Maksud**

Penyelenggaraan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada Siswa SLTA/Generasi Muda pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada Siswa SLTA dan Generasi Muda pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **3. Hasil**

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman Siswa SLTA/Generasi Muda pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentang Wawasan

- Kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Menumbuhkan semangat kebersamaan di kalangan Siswa SLTA/Generasi Muda dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa
  - c. Meningkatnya kesadaran Siswa SLTA/Generasi Muda pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. RUANG LINGKUP DAN MATERI**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan adalah memberikan pembekalan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wawasan kebangsaan kepada Siswa SLTA/Generasi Muda di pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Materi yang akan diberikan antara lain adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penguatan Wawasan Kebangsaan
2. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Empat Konsensus Dasar Dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara
4. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda.

### **B. METODOLOGI**

Kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### 1. Peserta

Peserta kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini diikuti oleh masing-masing 125 (seratus dua puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Siswa SLTA/Generasi Muda di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto dengan jumlah total 625 (enam ratus dua puluh lima) orang.

#### 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dilaksanakan masing-masing selama 1 (satu) hari pada Triwulan I di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, Triwulan II di 1 (satu) Kabupaten/Kota, dan Triwulan III di 1 (satu) Kabupaten/Kota.

#### 3. Nara Sumber

Adapun Nara sumber yang akan menyampaikan materi untuk kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini adalah sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota
2. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat
3. Pakar/Akademisi.
4. Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat

### **D. PANITIA PELAKSANA**

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota tempat dilaksanakannya Kegiatan, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota

5. Sekretariat

**E. KOORDINASI DAN MONITORING**

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi tentang kebijakan-kebijakan dibidang Wawasan Kebangsaan kepada pejabat yang berwenang dibidang Wawasan Kebangsaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang implementasi wawasan kebangsaan di daerah maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai tindak lanjut penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**A. SUMBER DANA**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan.

**B. PEMANFAATAN DANA**

Kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan didukung dengan dana sebesar Rp. 418.242.087,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

**BAB IV  
PENUTUP**


1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
2. Setelah selesai kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019  
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG

  
FIRDAUS, SH

Pembina  
NIP. 19641231 198703 1 094

Menyetujui :  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
NAZWIR, SH, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641111 199003 1 008